

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Proses pembuatan laporan tahunan tidak lepas dari penelitian mengenai kelengkapan pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan tahunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini sangat penting dilakukan karena akan memberikan gambaran kondisi perusahaan, serta mampu menunjukkan sifat perbedaan kelengkapan ungkapan antar perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perusahaan akan menggunakan laporan tahunannya yang terdiri dari laporan wajib dan laporan sukarela untuk pemegang saham dan investor potensial maupun pemerintah. Laporan tahunan pada dasarnya adalah sumber informasi bagi investor sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dalam pasar modal, juga sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Kartika, 2009).

Era globalisasi saat ini menuntut adanya suatu sistem akuntansi internasional yang dapat diberlakukan secara internasional di setiap negara atau diperlukan adanya harmonisasi terhadap standar akuntansi internasional, dengan tujuan agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan hubungan baik dengan pelanggan, supplier, investor dan kreditor (Gamayuni, 2009). Na'im dan Rakhman (2000) menyatakan bahwa pengungkapan laporan keuangan

dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku, sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk keputusan oleh para pemakai laporan keuangan.

Beberapa tahun terakhir, pengungkapan dan transparansi dalam laporan keuangan menjadi isu penting di Indonesia, *Forum for Corporate governance in Indonesia* (FCGI, 2006) mempublikasikan sebuah survei yang dilakukan oleh *Pricewaterhouse Coopers* pada tahun 1999 terhadap investor internasional di Asia, yang menunjukkan bahwa peringkat Indonesia berada pada salah satu yang terburuk dalam standar audit dan kepatuhan, akuntabilitas kepada pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi (Utami *et al.*, 2012).

Adanya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di pasar modal menjadi bukti bahwa transparansi dan kepatuhan terhadap pengungkapan wajib masih kurang, terutama pada laporan laba rugi, misalnya kasus *mark-up* laporan keuangan PT Kimia Farma, Tbk yang *overstated*, yaitu laba pada laporan keuangan yang seharusnya Rp 99,594 miliar ditulis Rp 132,000 miliar sehingga terjadi penggelembungan laba bersih tahunan senilai Rp 32,668 miliar (Syahrul, 2002 dalam Utami *et al.*, 2012). Manipulasi

laporan keuangan PT Kimia Farma, Tbk terjadi karena lemahnya penerapan *corporate governance*.

Kasus PT Kimia Farma, Tbk ini mengindikasikan pentingnya pengungkapan wajib dalam laporan keuangan. Pengungkapan wajib dalam laporan keuangan telah diatur dalam standar akuntansi internasional yaitu IFRS. Semua perusahaan *go public* dan multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS (*Internasional Financial Reporting Standards*) untuk penyusunan laporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2012 (Gamayuni, 2009).

Adopsi peraturan pengungkapan saja tidak dapat menjamin tingkat pengungkapan yang lebih tinggi sehingga diperlukannya sistem institusional yaitu *corporate governance* untuk memonitor manajer dan mengelola perusahaan untuk menjamin bahwa perusahaan mengungkapkan informasi yang memadai (Akhtaruddin *et al.*, 2009).

Corporate governance mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja perusahaan (Mintara, 2008 dalam dalam Prawinandi *et al.*, 2012), dimana hasil kinerja perusahaan ini tertuang dalam pengungkapan perusahaan. Inti *corporate governance* di Indonesia adalah pada dewan komisaris menurut FCGI, 2001 (*Forum Corporate Governance in Indonesia*), sehingga mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris, termasuk komite yang berada di bawah dewan komisaris yaitu komite audit. Mekanisme *corporate governance* tersebut antara lain jumlah anggota dewan

komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, jumlah anggota komite audit dan jumlah rapat dewan komisaris.

Dewan komisaris adalah organisasi perseroan yang melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada direksi untuk memastikan bahwa perseroan dikelola sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dewan direksi telah patuh kepada hukum dan peraturan perundangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Tugas dewan komisaris adalah organisasi perseroan yang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya maupun secara khusus, sesuai batasan yang ditetapkan. Inti dari *corporate governance* ada pada dewan komisaris karena tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi dan mengevaluasi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh dewan direksi serta memberikan nasehat kepada dewan direksi (Muntoro. 2005 dalam Prawinandi *et al*, 2012).

Proporsi komisaris independen dapat memastikan transparansi, struktur yang sehat, dan pengambilan keputusan yang rasional (Apostolou dan Nanopoulos, 2009). Dengan makin besarnya proporsi komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan (Nasution dan Setiawan, 2007).

KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) (2006) mengungkapkan bahwa tugas komisaris utama adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris. Jika komisaris utama memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis, diharapkan koordinasi dewan komisaris menjadi lebih efektif. Latar belakang pendidikan komisaris utama yang mempunyai pendidikan bisnis (keuangan) juga menjadi variabel penentu. Komisaris utama yang mempunyai latar belakang pendidikan bisnis biasanya berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki (Suhardjanto, 2012).

Rapat dewan komisaris merupakan suatu yang harus dilalui untuk mengambil keputusan dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Brick dan Chidambaran (2007) menunjukkan bahwa semakin banyak frekuensi rapat yang diselenggarakan dewan komisaris maka semakin meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan demikian semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat maka akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan.

Komite Audit mempunyai peranan penting untuk mengawasi dan memantau proses pelaporan keuangan perusahaan, pengendalian internal dan audit ekstrenal. Kep-29/PM/2004 menjelaskan bahwa tugas komite audit adalah memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris.

Proses pengauditan merupakan suatu sarana bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan atau para *stakeholders* untuk memverifikasi validitas laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen. Laporan keuangan yang telah di audit tersebut dapat diyakini kualitasnya apabila proses audit atas laporan keuangan tersebut dilakukan oleh auditor yang memiliki kualitas tinggi dan bertaraf internasional (Sari *et al.*, 2010). Dengan adanya audit yang baik atas laporan keuangan maka pengungkapan terhadap laporan keuangan juga akan semakin luas.

Berdasarkan latar belakang serta beberapa pendapat penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM TINGKAT KEPATUHAN MANDATORY DISCLOSURE KONVERGENSI IFRS PERUSAHAAN MANUFAKTUR TAHUN 2012-2013”**

Penelitian tentang tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS sudah dilakukan oleh beberapa orang, antara lain Tsalavoutas *et al.* (2008) di Yunani; Al-Akra *et al.* (2010) di Yordania; Tsalavoutas dan Dionysiou (2011) di Yunani dalam Prawinandi *et al.*, (2012). Penelitian ini merupakan replikasi dari Prawinandi *et al.*, (2012). Perbedaan penelitian terletak pada penambahan variabel independen yaitu ukuran KAP yang diduga berpengaruh terhadap *mandatory disclosure*. Penelitian ini mengubah sampel yang pada penelitian terdahulu disebutkan menggunakan periode 2009-2010, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan periode tahun 2012-2013, karena pada tahun 2012

mulai dilakukan evaluasi secara komprehensif terhadap penggunaan PSAK berbasis IFRS. Penelitian ini mengubah obyek penelitian dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan obyek perusahaan jasa. Pada penelitian ini menggunakan obyek perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena perusahaan manufaktur mempunyai cakupan yang lebih luas dan manufaktur merupakan industri andalan dalam usaha pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi. Motivasi penelitian ini adalah ingin mengetahui tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS pada perusahaan manufaktur.

B. Batasan Masalah

Peran mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah anggota komite audit. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur periode 2012-2013.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh secara positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS ?
2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh secara positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS ?

3. Apakah latar belakang pendidikan komisaris utama berpengaruh secara positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS ?
4. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh secara positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS ?
5. Apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh secara positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS ?
6. Apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh secara positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
2. Untuk menganalisis proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
3. Untuk menganalisis latar belakang pendidikan komisaris utama berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
4. Untuk menganalisis jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
5. Untuk menganalisis jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

6. Untuk menganalisis ukuran kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi dari berbagai bidang yang berkaitan :

1. Praktisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih tentang pentingnya pengungkapan wajib dalam laporan keuangan.
- b. Memberikan pemahaman tentang seberapa besar tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada perusahaan manufaktur.
- c. Memberikan informasi kepada investor dalam mengambil keputusan untuk menanamkan modalnya pada perusahaan manufaktur.

2. Teoritis

- a. Memberikan bukti empiris mengenai peran mekanisme *corporate governance* dan ukuran kantor akuntan publik dalam tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
- b. Diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan memberikan hasil penelitian mengenai peran mekanisme *corporate governance* dan ukuran kantor akuntan publik dalam tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.